BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat ialah memberikan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan.

Menurut (Fitrianto & Farhan, 2023), pemberdayaan masyarakat adalah sekumpulan praktek dan kegiatan yang diungkapkan dalam bentuk simbol simbol. Simbol simbol tersebut kemudian mengomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk untuk mengubah hal hal yang terkandung dalam diri kita (inner space), orang orang lain yang dianggap penting serta masyarakat kita.

Menurut (Kusuma Putra et al., 2022), pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksitas yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri.

Upaya pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa dikarenakan besarnya anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh negara melalui Anggaraan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dengan tujuan untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat. Namun

dalam perjalanannya masih banyak terdapat kesalahan pengelolaan yang mengakibatkan tidak terlaksananya tujuan dari Dana Desa tersebut digunakan, sehingga mengakibatkan adanya beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak terlaksana (Ridha, 2018).

Merujuk pendapat Endah (2020), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat intinya membangkitkan potensi yang ada dalam diri individu atau kelompok dengan memberikan dorongan, memberikan kesadaran akan potensi yang dimiliki orang atau kelompok tersebut dengan tujuan pemberdayaan mengarah kepada keadaan capaian atau yang ingin dihasilkan ke arah perubahan masyarakat yang berdaya guna dan memiliki kemampuan dalam merubah dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Dijelaskan juga bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan jalan bagaimana potensi lokal dapat dibangun sehingga berdaya guna memiliki kemampuan dan kekuatan untuk merubah kehidupan kearah yang lebih baik.

Menurut Friedmann (2021) mendefinisikan pemberdayaan desa sebagai proses di mana masyarakat desa diberi kendali lebih besar atas pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan desa bersifat inklusif, berkelanjutan, dan dapat menciptakan otonomi dalam pengelolaan kebutuhan lokal. Pemberdayaan ini berfokus pada penguatan posisi masyarakat desa sebagai aktor utama dalam pembangunan. Friedmann menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan desa pada pihak eksternal dengan meningkatkan kapasitas lokal untuk pengambilan keputusan strategis. Upaya pemberdayaan Dana Desa dalam telah

difokuskan pada berbagai aspek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan adalah:

- a) Pemberdayaan Ekonomi Lokal Dana Desa dimanfaatkan untuk mendukung pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian berbasis potensi lokal. BUMDes ini mengelola berbagai sektor, seperti pariwisata, pertanian, dan perdagangan produk lokal, yang telah membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
- b) Peningkatan Infrastruktur dan Kesehatan Infrastruktur desa seperti jalan, fasilitas sanitasi, dan penyediaan air bersih dibangun menggunakan Dana Desa. Selain itu, program kesehatan seperti posyandu, pemberian makanan bergizi, dan penanganan stunting juga menjadi fokus utama. Langkah ini berkontribusi pada peningkatan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
- c) Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Upaya ini dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan kepada aparatur desa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan dan efektif sesuai kebutuhan masyarakat.
- d) Pengentasan Kemiskinan Dana Desa digunakan untuk mendukung program padat karya tunai, yang memberikan pekerjaan sementara bagi warga desa saat menghadapi masa sulit, seperti bencana atau musim paceklik. Hal ini

tidak hanya membantu menekan angka kemiskinan tetapi juga memperkuat solidaritas sosial.

e) Pengawasan dan Transparasi Pengawasan Penggunaan Dana Desa menjadi prioritas untuk menghindari penyalahgunaan anggaran. Sistem pelaporan terbuka dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan desa menjadi langkah penting untuk mendorong akuntabilitas.

Menurut (Mardikanto, 2014), tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, mengelola sumber daya secara mandiri, dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Sugeng Wahyudi (2018) menyarankan bahwa dana desa digunakan untuk pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa. Menurutnya, setiap desa memiliki potensi unggulan yang bisa dimanfaatkan, seperti produk pertanian khas, kerajinan tangan, atau objek wisata lokal. Dana desa bisa dialokasikan untuk mendorong usaha kecil menengah (UKM) atau industri kreatif berbasis desa agar dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Wahyudi juga menekankan bahwa pengembangan ekonomi ini perlu disertai dengan pelatihan manajemen usaha agar masyarakat mampu mengelola usaha mereka secara mandiri.

Konsep pemberdayaan masyarakat, (Paulus Wirutomo 2013) menjelaskan mengenai prinsip-prinsip sebagai pemenuhannya. Dalam melakukan pembangunan tidak sekedar mengejar hal materi semata, akan tetapi memiliki progres berkepanjangan bagi masyarakat. Hal lainnya yakni mengindentifikasi

semua potensi yang ada pada masyarakat serta memiliki kerjasama kemitraan.Sehingga tidak hanya dari satu sisi atau masyarakat semata yang bekerja, pemerintah atau lembaga lainnya berkerjasama dalam melakukan pembangunan tersebut.

Alsop dan Heinsohn (2020) berpendapat bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah memberikan masyarakat akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi dan teknologi digital. Mereka menyoroti pentingnya pemberdayaan digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan cara memperluas akses informasi, pelatihan keterampilan digital, dan kesempatan kerja yang lebih baik. Zimmerman dan Warsame (2021) mengemukakan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan komunitas dalam mengembangkan keterampilan baru, terutama dalam konteks ekonomi global yang berbasis teknologi. Pemberdayaan harus membantu masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi digital sehingga mereka lebih kompetitif dan mandiri secara ekonomi.

Yusuf dan Musa (2022) berpendapat bahwa sasaran utama pemberdayaan adalah individu dan komunitas yang berada di area terpencil atau kurang berkembang, yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan ekonomi. Mereka menggarisbawahi pentingnya sasaran pemberdayaan pada peningkatan kemampuan kewirausahaan dan pengembangan kapasitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. sasaran pemberdayaan meliputi masyarakat yang kurang terpapar teknologi dan informasi, terutama di daerah pedesaan. Mereka berfokus pada peningkatan literasi digital dan akses pada

teknologi bagi kelompok ini, agar mereka dapat memanfaatkan peluang ekonomi digitaldan mengatasi ketimpangan informasi Menurut Alsop dan Heinsohn (2020)

Kabeer (2018)menekankan bahwa pemanfaatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses ekonomi bagi kelompok rentan, terutama perempuan. Menurutnya, pemberdayaan harus dimanfaatkan untuk memberikan akses pada sumber daya ekonomi, layanan keuangan, dan kesempatan kerja, sehingga kelompok marginal dapat keluar dari kemiskinan dan menjadi lebih mandiri. Cornwall dan Edwards (2019) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam politik dan pengambilan keputusan. Dengan cara ini, masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses kebijakan publik memperjuangkan hak-hak mereka. Pemberdayaan difokuskan pada memperkuat suara masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Ahmad Erani Yustika (2020) dana desa harus digunakan sebagai alat untuk penguatan ekonomi desa dalam jangka panjang. Ia berpendapat bahwa dana desa seharusnya fokus pada pengembangan usaha produktif berbasis komoditas lokal dan peningkatan akses terhadap pasar bagi produk desa. menekankan perlunya perencanaan yang berkelanjutan agar pemberdayaan masyarakat ini menghasilkan dampak yang nyata dan berjangka panjang. Dana desa juga harus mendukung pembentukan kelembagaan ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi di desa.

Desa Bangka Ajang setiap tahunya mengadakan rapat mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilaksanakan dikantor desa Bangka Ajang untuk membuat anggaran pendapatan dan belanja desa yang di laksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil dan keputusan bersama dengan kepala desa Bangka ajang. Berikut adalah tabel Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bangka Ajang Tahun 2024.

Tabel 1.1 Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bangka Ajang Tahun 2024

	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	Bidang Pertanian dan Perternakan:	200.110.800.00	
	Belanja Modal:	200.110.800.00	
1.	Belanja modal irigasi/embung drainase/honor tim <i>pelaksanan</i> <i>kegiatan</i>	5.850.000.00	Dari Dana Desa
2.	Belanja modal irigasi/embung drainase/upah tenaga kerja	57.365.000.00	
3.	Belanja modal irigasi/embung drainase/bahan baku dan material	101.871.118.00	
4.	Belanja modal irigasi/embung drainase/sewa peralatan	35.024.682.00	

Sumber: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa pemerintah desa Bangka Ajang Tahun 2024

Dilihat dari tabel anggaran pemberdayaan masyarakat di desa Bangka Ajang diatas, pemerintah desa lebih berfokus ke sub bidang pertanian dan perternakan dengan anggaran sebesar Rp 200,110,800,00 seharusnya dengan anggaran sebesar ini sub bidang pertanian dan perternakan di desa Bangka Ajang mengalami kemajuan yang pesat, sementara dari hasil observasi penulis di desa Bangka Ajang pada bidang sub pertanian dan perternakan kurang mengalami kemajuan contonya di Bidang

pertanian,untuk kesedian pangan karena hasil pertanian masyarakat desa Bangka Ajang di bawah rata-rata karena kurangnya ketersediaanya pupuk sehingga berdampak pada kesuburan tanaman sehingga dapat mempengaruhi hasil panen pada masyarakat desa Bangka Ajang.

Belanja modal di Desa Bangka Ajang tahun ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur irigasi, embung, dan drainase. Seluruh kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana pengairan desa, mendukung sektor pertanian, serta mencegah banjir atau genangan air di musim hujan. Total anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal ini sebesar Rp 200.110.800,00 dan seluruhnya bersumber dari Dana Desa. Alokasi anggaran tersebut mencakup beberapa komponen penting, yaitu honor untuk tim pelaksana kegiatan, upah bagi tenaga kerja lokal, pembelian bahan bangunan dan material, serta biaya sewa peralatan pendukung pekerjaan. Dengan pembagian anggaran yang terstruktur ini, pemerintah desa berharap pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung ketahanan air dan pertanian di wilayah desa.

Belanja modal di Desa Bangka Ajang yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur irigasi, embung, dan drainase sejatinya merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah desa dalam mendorong kemajuan sektor pertanian dan peternakan. Fasilitas irigasi dan pengelolaan air yang baik seharusnya menjadi fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat, karena pengairan yang lancar dan teratur sangat menentukan kesuburan lahan dan keberhasilan panen.

Namun, berdasarkan hasil observasi, dampak dari belanja modal tersebut belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Salah satu penyebab utama yang teridentifikasi adalah kurangnya ketersediaan pupuk dan input pertanian lainnya. Meskipun infrastruktur fisik seperti saluran air dan embung dibangun, jika tidak disertai dengan dukungan lain seperti subsidi pupuk, pelatihan teknis, atau penyuluhan pertanian, maka hasil panen tetap akan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal infrastruktur saja belum cukup, dan perlu adanya sinergi dengan program-program pemberdayaan nonfisik untuk menjawab kebutuhan riil petani.

Selain itu, dalam konteks peternakan, infrastruktur pengairan mungkin tidak secara langsung berdampak signifikan kecuali disertai pengembangan fasilitas kandang, pakan ternak, atau pelatihan kesehatan hewan. Maka dari itu, belanja modal perlu diperluas dan diseimbangkan dengan kegiatan pemberdayaan lainnya yang lebih menyentuh aspek teknis dan kebutuhan petani dan peternak di lapangan.

Anggaran sebesar Rp 200.110.800,00 menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam membangun sektor pertanian dan peternakan. Namun agar dampaknya optimal, ke depan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, serta penyesuaian alokasi anggaran agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aspek pendukung seperti penyediaan pupuk, pelatihan, bibit unggul, dan penyuluhan pertanian.

Dengan adanya penyaluran dana desa yang nominalnya besar ke masingmasing desa dibutuhkan kompetensi dan pengawasan yang ketat dari masingmasing pemerintah desa dalam pengelolaannya. Hal tersebut dibutuhkan untuk menghindari adanya kecurangan yang selama ini ditakutkan oleh pemerintah dan masyarakat (Widiyarta, 2017).

Seperti yang diterangkan dalam penelitian Andi Saputra (2021) Dana desa merupakan wujud kebijakan pemerintah yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanaan dasar. Program dana desa untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana desa merupakan suatu alternatif yang logis dalam upaya peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Kinerja Pengelolahan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bangka Ajang Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai"

1.2 Rumusan Masalah

 Bagaimana Kinerja Pengelolaan Dana Desa dalam Kinerja Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bangka Ajang Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai?

- 2. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Pemberdayaan di Desa Bangka Ajang Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai ?
- 3. Bagaimana Dampak Kinerja Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bangka Ajang Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Menjelaskan Kinerja Pengelolahan Dana Desa di Desa Bangka Ajang Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai
- Menjelaskan Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolahan Dana Desa untuk Meningkatkan Pemberdaya di Desa Bangka Ajang Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai
- Mengidentifikasikan Bagaimana Dampak Kinerja Pengelolahan Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangka Aajang Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan dalam menamba wawasan serta berguna bagi bahan pembelajaran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh serta menambah pengalaman dan wawasan dalam bidang penulisan karya ilmiah.